



RKPD 2018

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MATARAM TAHUN 2018



*Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram Tahun 2017*



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3. Hubungan Antar Dokumen	8
1.4. Sistematika Dokumen	9
1.5. Maksud dan Tujuan	10
II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	12
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	12
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	13
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	30
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	45
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	106
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	117
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	136
III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan	139
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	139
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun sebelumnya dan Perkiraan Tahun 2017 serta Target Tahun 2018	139
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018.....	147
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	151
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	152
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	155
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	158
IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan	161
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018	161
4.2. Prioritas Pembangunan	179
V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah	211
VI Penutup	270



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Lingkungan Menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2015.....	13
Tabel 2.2	Luas Wilayah Kota Mataram Menurut Kecamatan dan Kelurahan.....	14
Tabel 2.3	Penggunaan Lahan Menurut Kesesuaian dengan RUTR (Ha) di Kota Mataram Tahun 2012-2016.....	20
Tabel 2.4	Klaster Industri Kecil Unggulan Kota Mataram.....	24
Tabel 2.5	Indikator Kependudukan Kota Mataram Tahun 2015-2016.....	26
Tabel 2.6	Pertumbuhan Penduduk dirinci per Kecamatan Tahun 2015-2016.....	27
Tabel 2.7	Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2015-2016.....	27
Tabel 2.8	Proyeksi Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016.....	28
Tabel 2.9	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Dependency Ratio Kota Mataram 2015-2016.....	28
Tabel 2.10	Grafik PDRB Kota Mataram Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan.....	30
Tabel 2.11	Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHB Tahun 2011-2016 Kota Mataram.....	31
Tabel 2.12	Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHK Tahun 2015-2016 Kota Mataram.....	32
Tabel 2.13	Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kota Mataram Tahun 2011-2015.....	37
Tabel 2.14	Perkembangan IPM Kota Mataram Tahun 2015-2016.....	37
Tabel 2.15	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Mataram Tahun 2011-2016.....	39
Tabel 2.16	APM dan APK Untuk SD/Setara, SMP/Setara dan SMA/Setara di Kota Mataram Tahun 2012-2016.....	41
Tabel 2.17	Perkembangan Angka Harapan hidup (AHH) Kota Mataram Tahun 2011-2016.....	42
Tabel 2.18	Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk Kota Mataram Tahun 2011-2015.....	42
Tabel 2.19	Rasio Grup Kesenian/Sanggar Kesenian dan Klub Olahraga per 10.000 Penduduk di Kota Mataram Tahun 2011-2016.....	44
Tabel 2.20	Statistik Sekolah, Guru dan Murid Tahun 2012-2016.....	45
Tabel 2.21	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Mataram Tahun 2012-2016.....	46



Tabel 2.22	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah di Kota Mataram Tahun 2012-2016.....	46
Tabel 2.23	Rasio Murid Terhadap Guru Pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Mataram Tahun 2012-2016.....	47
Tabel 2.24	Rasio Guru Terhadap Murid Pada Jenjang Pendidikan Dasar menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2015.....	47
Tabel 2.25	Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kota Mataram Tahun 2012-2016.....	48
Tabel 2.26	Jumlah Puskesmas dan Pustu di Kota Mataram Tahun 2011-2015.....	49
Tabel 2.27	Jumlah Puskesmas dan Pustu Menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2015.....	49
Tabel 2.28	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk di Kota Mataram Tahun 2012-2016.....	50
Tabel 2.29	Jumlah dan rasio Dokter per Jumlah Penduduk di Kota Mataram Tahun 2012-2016.....	50
Tabel 2.30	Jumlah Dokter Menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2016.....	51
Tabel 2.31	Jumlah Penderita Gizi Buruk di Kota Mataram Tahun 2011-2015.....	51
Tabel 2.32	Cakupan Puskesmas di Kota Mataram Tahun 2012-2016.....	52
Tabel 2.33	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Mataram Tahun 2012-2016.....	52
Tabel 2.34	Capaian Indikator Pembangunan Penataan Ruang di Kota Mataram Tahun 2011-2015.....	54
Tabel 2.35	Rasio Rumah Layak huni di Kota Mataram Tahun 2014-2016.....	56
Tabel 2.36	Jumlah Tempat Ibadah Menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2012-2016.....	56
Tabel 2.37	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Mataram Tahun 2012-2016.....	57
Tabel 2.38	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Mataram Tahun 2014-2016.....	57
Tabel 2.39	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2015-2015.....	60
Tabel 2.40	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk di Kota Mataram Tahun 2014-2016.....	61
Tabel 2.41	Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk di Kota Mataram Tahun 2014-2015.....	61
Tabel 2.42	Rasio Pos Siskamling per Kelurahan di Kota Mataram Tahun 2014-2015.....	62
Tabel 2.43	Jumlah Sarana Sosial di Kota Mataram Tahun 2011-2015.....	63
Tabel 2.44	Persentase Penanganan Sampah di Kota Mataram Tahun 2015.....	71



Tabel 2.45	Rasio Penduduk ber KTP di Kota Mataram Tahun 2012-2016.....	73
Tabel 2.46	Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kota Mataram Tahun 2012-2016.....	74
Tabel 2.47	Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kota Mataram Tahun 2012-2016.....	74
Tabel 2.48	Kepemilikan KTP di Kota Mataram Tahun 2012-2016.....	74
Tabel 2.49	Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 Penduduk di Kota Mataram Tahun 2012-2016.....	74
Tabel 2.50	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kota Mataram Tahun 2014-2015.....	75
Tabel 2.51	Persentase LPM Berprestasi di Kota Mataram Tahun 2014-2015.....	76
Tabel 2.52	Persentase PKK Aktif di Kota Mataram Tahun 2014-2015.....	76
Tabel 2.53	Persentase Posyandu Aktif di Kota Mataram Tahun 2014-2015.....	76
Tabel 2.54	Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Mataram Tahun 2014-2015.....	76
Tabel 2.55	Rincian Pemasangan Fasilitas Keselamatan dan Perlengkapan Jalan di Kota Mataram Tahun 2014-2015.....	80
Tabel 2.56	Rasio Warnet Terhadap Penduduk di Kota Mataram Tahun 2014-2015.	82
Tabel 2.57	Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Tahun 2015.....	89
Tabel 2.58	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Mataram Tahun 2014-2015.....	93
Tabel 2.59	Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Tahun 2015.....	102
Tabel 2.60	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan Tahun 2011-2015.....	105
Tabel 2.61	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Kota Mataram Tahun 2011-2015.....	106
Tabel 2.62	Produktivitas Total Daerah di Kota Mataram Tahun 2011-2015.....	107
Tabel 2.63	Jumlah Orang/Barang yang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun di Kota Mataram Tahun 2011-2015.....	108
Tabel 2.64	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Mataram Tahun 2011-2015.....	108
Tabel 2.65	Luas Wilayah Produktif di Kota Mataram Tahun 2011-2015.....	109
Tabel 2.66	Luas Wilayah Industri di Kota Mataram Tahun 2011-2015.....	109
Tabel 2.67	Jenis, Jumlah Bank dan Cabangnya di Kota Mataram Tahun 2015.....	110
Tabel 2.68	Jumlah Hotel Menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2014-2015.	110
Tabel 2.69	Data Jenis dan Jumlah Gangguan Kriminal di Kota Mataram Tahun 2015.....	111
Tabel 2.70	Jumlah demo di Kota Mataram Tahun 2014-2015.....	112
Tabel 2.71	Lama Proses Perijinan di Kota Mataram Tahun 2011-2015.....	113



Tabel 2.72	Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Mataram Tahun 2011-2015.....	91
Tabel 2.73	Persentase Lulusan S1 di Kota Mataram Tahun 2011-2015.....	114
Tabel 2.74	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan.....	117
Tabel 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Mataram Tahun 2015 - 2017.....	141
Tabel 3.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Mataram Tahun 2015 - 2017.....	142
Tabel 3.3	Statistik Ketenagakerjaan Kota Mataram Tahun 2014-2016.....	145
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Mataram Tahun 2014-2018.....	150
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Mataram Tahun 2014-2018	158
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Mataram Tahun 2014-2018.....	160
Tabel 4.1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	170
Tabel 4.2	Prioritas Pembangunan Daerah.....	202
Tabel 4.3	Penjelasan Program Pembangunan Daerah Kota Mataram Tahun 2017..	204
Tabel 5.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mataram Tahun 2017.....	216
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Mataram Tahun 2014-2018.....	161
Tabel 4.1	Prioritas Pembangunan Daerah.....	193
Tabel 4.2	Penjelasan Program Pembangunan Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Berdasarkan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021.....	195
Tabel 4.3	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Mataram dengan Prioritas Nasional RKP 2018.....	202
Tabel 5.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mataram Tahun 2018	215

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kota Mataram.....	16
Gambar 2.2	Peta Topografi Administrasi Kota Mataram.....	17
Gambar 2.3	Peta Geologi Kota Mataram.....	20
Gambar 2.4	Peta Hidrologi Kota Mataram.....	20
Gambar 2.5	Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis	115



	Kelamin Tahun 2015.....	
Gambar 4.1	Strategi Pembangunan Nasional.....	166
Gambar 4.2	Sasaran Ekonomi Makro Nasional 2018	181

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Laju Inflasi Kota Mataram 2011-2016.....	33
Grafik 2.2	Laju Inflasi Kota Mataram terhadap Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2011-2016.....	34
Grafik 2.3	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Mataram Tahun 2012-2016.....	34
Grafik 2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram Tahun 2011-2016.....	35
Grafik 2.5	Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Mataram Tahun 2011-2016.....	36
Grafik 2.6	IPM Kabupaten/Kota se Provinsi NTB Tahun 2015-2016.....	38
Grafik 2.7	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kota Mataram Tahun 2011-2016.....	38
Grafik 2.8	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Mataram.....	40
Grafik 2.9	Perkembangan Angka Indikator Ketenagakerjaan Kota Mataram 2011-2015.....	43
Grafik 2.10	Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2015.....	115
Grafik 2.10	Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Mataram Tahun 2015.....	116
Grafik 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram Tahun 2015-2016 dan Proyeksi 2017-2018.....	140
Grafik 3.2	Laju Inflasi Kota Mataram Tahun 2011-2016.....	144
Grafik 4.1	Perkembangan TPT Nasional Tahun 2007-2016 dan Target tahun 2017-2018.....	183
Grafik 4.2	Perkembangan Angka Kemiskinan Nasional Tahun 2007-2016 dan Target tahun 2017-2018.....	184
Grafik 4.3	Perkembangan Rasio Gini Nasional Tahun 2007-2016 dan Target tahun 2017-2018.....	185



BAB I

PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan hubungan antar dokumen, sistematika dokumen serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD yang disusun oleh Pemerintah Daerah harus memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Walikota dan Wakil Walikota Mataram periode 2016-2021 dilantik pada tanggal 17 Februari 2016. Dengan demikian, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJM dan RKPD Tahun 2018, ditegaskan bahwa daerah yang telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2015 dan periode RPJM-



nya berakhir pada tahun 2015, maka dalam penyusunan RKPD tahun 2018 daerah tersebut agar berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, RKP tahun 2018 serta memperhatikan visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun RKPD Tahun 2018 sebagai penjabaran RPJMD juga harus memperhatikan kewenangan Pemerintah Daerah dan hasil inventarisasi personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D).

Kedudukan RKPD Kota Mataram tahun 2018 dalam periode RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMD tersebut yang menitikberatkan pada prioritas sesuai dengan tema pada pelaksanaan MPBM Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram tahun 2018 yaitu : **“Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Penigkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sarana Prasarana Perkotaan Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan”**, makna pertumbuhan ekonomi inklusif adalah memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tidak hanya mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun berusaha membangun kemandirian masyarakat pada akar rumput sebagai upaya pemerintah Kota Mataram dalam rangka mempercepat penurunan angka kemiskinan yaitu penurunan sebesar 1 persen per tahun. Pemilihan tema tersebut disinkronkan dengan tema RKP tahun 2018 yaitu **“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”** serta tema Musrenbang RKPD Provinsi NTB tahun 2018 yaitu “Menanggulangi Kemiskinan dan Mengurangi Kesenjangan, Memantapkan Infrastruktur dan Memacu Investasi yang Berkelanjutan.”

Mengingat posisi strategis dok.men RKPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan, maka Pemerintah Kota Mataram menyusun RKPD tahun 2018 dengan menggunakan pendekatan perencanaan yang teknokratis (metode dan kerangka berpikir ilmiah), demokratis dan partisipatif (mengakomodasi secara langsung berbagai kepentingan stakeholders dalam pembangunan), pendekatan



politis (mengakomodasi kepentingan politik), pendekatan *top down planning* (mandatory dari pemerintahan yang lebih tinggi) dan pendekatan *bottom up planning* (mengakomodasi secara optimal masukan dari masyarakat melalui jenjang pemerintahan). Selain itu, penyusunan RKPD Kota Mataram tahun 2017 juga dilandasi dengan 4 (empat) prinsip dasar perencanaan pembangunan, yaitu pembangunan berkelanjutan, partisipasi masyarakat, pengarusutamaan gender dan *good governance*.

Penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2018 dilakukan melalui proses sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu:

- a. **Tahapan Persiapan Penyusunan RKPD** yang meliputi:
 - Pembentukan Tim RKPD Kota Mataram Tahun 2017 (berdasarkan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 423/III/2017 tanggal 21 Maret 2017);
 - Orientasi mengenai RKPD kepada seluruh anggota tim;
 - Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; serta
 - Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- b. **Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD**, dilakukan melalui 2 (dua) tahapan kegiatan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu:
 - Perumusan rancangan awal RKPD, dilakukan melalui pengolahan data dan informasi, analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah, evaluasi kinerja tahun lalu, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, perumusan permasalahan pembangunan daerah, perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif, perumusan program prioritas beserta pagu indikatif, pelaksanaan forum konsultasi public dan penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif;
 - Penyajian rancangan awal RKPD dengan sistematika pendahuluan, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi



daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

- c. **Penyusunan Rancangan RKPD**, merupakan kelanjutan dari tahap penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2018 yang disempurnakan berdasarkan masukan dari Rancangan Renja SKPD Tahun 2018 dan melakukan sinergitas prioritas dan sasaran pembangunan nasional/provinsi.
- d. **Pelaksanaan Musrenbang RKPD**, Musrenbang RKPD di Kota Mataram dilakukan melalui pola yang bernama "Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM)" berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat yang merupakan suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi untuk penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat (tindakan bersama dengan masyarakat) dengan pelibatan berbagai perwakilan stakeholder pembangunan, antara lain delegasi DPRD, SKPD Pemerintah Provinsi NTB dan lingkup Pemerintah Kota Mataram, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, akademisi, fasilitator pembangunan, pimpinan organisasi profesi, LSM, kepala lingkungan kader Posyandu, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan tetap memperhatikan persentase keterwakilan gender. Pelaksanaan MPBM meliputi tahapan-tahapan:
-) MPBM Tingkat Kelurahan dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 26 Januari 2017, proses pelaksanaannya difasilitasi oleh Tim Fasilitator Pembangunan Kelurahan.
 -) MPBM Tingkat Kecamatan dilaksanakan pada 6 s.d. 14 Februari 2017, proses pelaksanaannya difasilitasi oleh Tim Fasilitator Pembangunan Kecamatan.
 -) MPBM Tingkat Kota Mataram Tahun 2017 dalam rangka penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 14 Maret 2017.
- OPD pelaksana MPBM Perencanaan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan adalah Kecamatan se-Kota Mataram didampingi oleh Fasilitator Pembangunan Kota Mataram; dan pelaksana MPBM Tingkat Kota adalah Bappeda Kota Mataram.



- J) Forum Gabungan OPD, adalah wadah pembahasan Renja OPD untuk penyelarasan program dan kegiatan sesuai tupoksi OPD berdasarkan usulan hasil MPBM Kecamatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, penyelenggaraan Forum SKPD dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD sekaligus dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas, sehingga pelaksanaan Forum SKPD di Kota Mataram dibagi dalam tiga forum sesuai dengan Tiga Program Unggulan Pemerintah Kota Mataram, yaitu:
- 1) Forum Gabungan Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Mataram;
 - 2) Forum Gabungan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram; dan
 - 3) Forum Gabungan Bidang Sarana dan Prasarana (SARPRAS) dilaksanakan oleh Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Mataram.
- e. **Perumusan rancangan akhir RKPD**, merupakan tahap finalisasi RKPD Kota Mataram 2018 oleh Tim Koordinasi Penyusunan RKPD dan TAPD Pemerintah Kota Mataram dengan bahan penyusunan yang dari hasil berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD.
- f. **Penetapan RKPD**, RKPD Kota Mataram Tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mataram dan selanjutnya akan digunakan sebagai landasan dalam penyusunan KUA PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4598);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;



14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029;
22. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;
23. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013;
25. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;



27. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
28. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

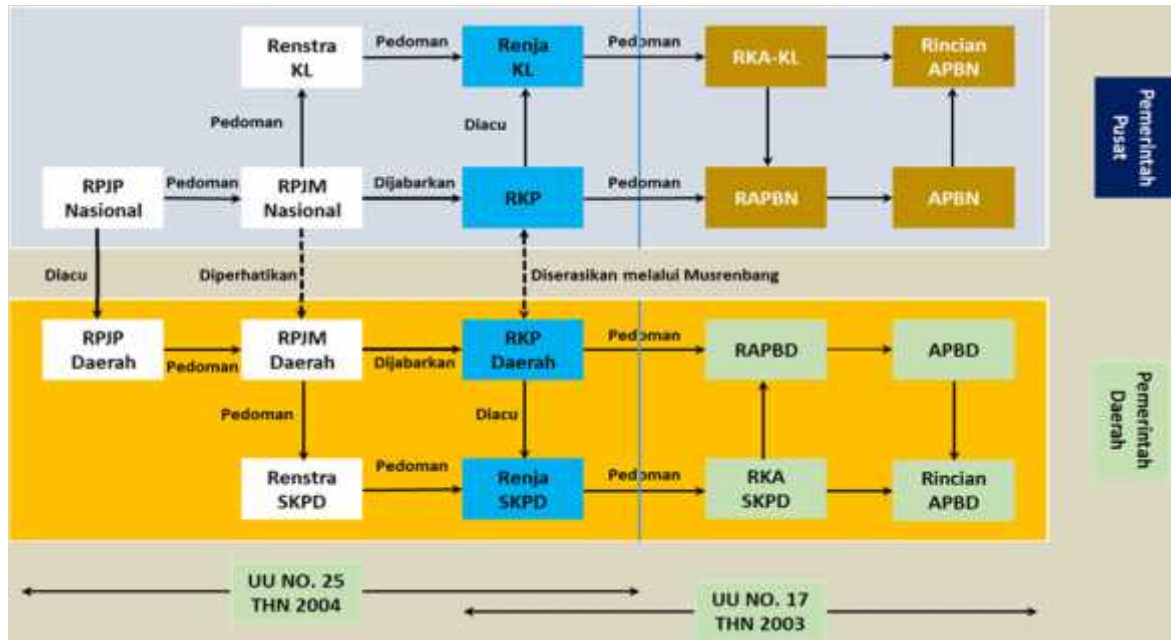
Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan ruang lingkup yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan terjemahan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan juga tidak terlepas dari rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya RPJMN maupun RPJMD menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dalam menyusun RENSTRA K/L dan menjadi acuan SKPD di Kota Mataram untuk menyusun RENSTRA SKPD. Rencana lima tahunan diterjemahkan ke dalam rencana tahunan berupa RKP di tingkat nasional dan RKPD Kota Mataram di tingkat Kota Mataram.

RKPD Kota Mataram Tahun 2018 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD Tahun 2018 merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. Dalam praktiknya, penyusunan RKPD 2017 juga disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional. Penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

RKPD Kota Mataram tahun 2018 disusun berdasarkan Rancangan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021, Renja SKPD disusun mengacu pada Renstra SKPD dan hasil dari MPBM RKPD Tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam gambar 1 berikut ini tentang hubungan antara dokumen perencanaan pusat dan daerah.

Gambar 1

Keterkaitan Dokumen Perencanaan Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004

Berdasarkan uraian diatas RKP Kota Mataram tahun 2018 disusun mengacu pada RPJPD 2005-2025 dan program kerja serta Visi dan Misi Kepala daerah terpilih, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 dan RKP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, selanjutnya RKP Kota Mataram Tahun 2018 dijadikan pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kota Mataram Tahun 2018.

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN

Sistematika RKP Kota Mataram Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKP, maksud dan tujuan.

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKP Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan



Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJPD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Memuat penjelasan tentang kondisi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

BAB VI Penutup

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan Arah, Kebijakan Umum dan Prioritas Pembangunan Daerah.

RKPD juga sebagai landasan dan pedoman kebijakan operasional bagi Perangkat Daerah Kota Mataram dalam menyusun Rencana Kerja berdasarkan program dan kegiatan, serta Rencana Kerja Anggaran sesuai dengan peran,



tugas dan fungsi masing-masing SKPD; dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta memberikan arahan perencanaan pembangunan Kota Mataram Tahun 2018.

Tujuan dari penyusunan RKPD adalah untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan tahunan secara efektif dan efisien guna mempertajam prioritas pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan yang dapat mengatasi permasalahan, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dapat mencapai hasil yang optimal, melalui:

- a. Penetapan prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
- b. Perumusan rencana program dan kegiatan strategis pembangunan daerah;
- c. Penetapan target indikator kinerja dan pagu anggaran indikatif per kegiatan.